



## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH BANJIR DI KELURAHAN UTAMA, KECAMATAN CIMAH SELATAN, KOTA CIMAH**

**Eva Nur Hidayah<sup>1)</sup>**

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan banjir di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Permasalahan sampah yang menumpuk di saluran air menjadi salah satu penyebab utama terjadinya genangan dan banjir lokal, sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, tidak hanya pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kolaborasi antara kelurahan, RT/RW, Dinas Lingkungan Hidup, komunitas lingkungan, pihak swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka *collaborative governance* yang menekankan pada kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan kolaboratif, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum kolaborasi, pengelolaan sampah masih bersifat parsial dan reaktif. Setelah kolaborasi berjalan, koordinasi antaraktor menjadi lebih baik, peran masing-masing lebih jelas, serta partisipasi masyarakat meningkat. Kolaborasi tersebut memberikan dampak positif berupa berkurangnya penumpukan sampah di saluran air dan meningkatnya kesadaran warga terhadap kebersihan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *collaborative governance* efektif dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai upaya pencegahan banjir di tingkat kelurahan.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, Pengelolaan Sampah, Pencegahan Banjir, Kelurahan Utama.

### **Abstract**

*This study examines the process of collaborative governance in waste management as an effort to prevent flooding in Kelurahan Utama, Cimahi Selatan District, Cimahi City. Waste accumulation in drainage channels has become one of the main causes of local flooding, requiring the involvement of multiple actors beyond government institutions. This study aims to analyze the collaboration between the village government, neighborhood leaders, the Environmental Agency, environmental communities, the private sector, and local residents in managing waste. The research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The analysis applies a collaborative governance framework focusing on starting conditions, institutional design, collaborative leadership, and collaborative processes. The findings indicate that prior*

*to collaboration, waste management was fragmented and reactive. After the collaboration was implemented, coordination among stakeholders improved, roles became clearer, and community participation increased. This collaborative effort resulted in positive outcomes, including reduced waste accumulation in drainage systems and increased public awareness of environmental cleanliness. The study concludes that collaborative governance is effective in supporting community-based waste management as a strategy for flood prevention at the village level.*

**Keywords:** Collaborative Governance, Waste Management, Flood Prevention, Kelurahan Utama.

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan sampah dan banjir merupakan isu lingkungan perkotaan yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Indonesia. Pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah terus meningkat, sementara kapasitas pengelolaan sampah belum sepenuhnya mampu mengimbangnya. Kondisi tersebut berdampak pada penumpukan sampah di saluran air, yang kemudian memicu terjadinya genangan hingga banjir, terutama pada musim hujan. Fenomena ini juga terjadi di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang memiliki karakteristik wilayah padat penduduk dan dikelilingi oleh kawasan industri serta aktivitas perkotaan lainnya.

Selama ini, upaya pengelolaan sampah cenderung dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Namun dalam praktiknya, pendekatan yang bersifat sektoral dan top-down sering kali belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Keterbatasan sarana, pembatasan ritase tempat pembuangan akhir, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan membuang sampah menjadi faktor yang memperparah kondisi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang tidak hanya bertumpu pada peran pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai aktor lain, seperti RT/RW, komunitas lingkungan, pihak swasta, dan masyarakat secara langsung.

Pendekatan collaborative governance menjadi relevan dalam konteks ini karena menekankan pentingnya kerja sama lintas aktor dalam penyelesaian masalah publik yang kompleks. Melalui kolaborasi, diharapkan setiap aktor dapat berkontribusi sesuai dengan peran dan sumber daya yang dimiliki, sehingga pengelolaan sampah tidak lagi bersifat reaktif, melainkan terencana

dan berkelanjutan. Di Kelurahan Utama, kolaborasi mulai dibangun melalui berbagai program seperti pemilahan sampah dari sumber, penguatan bank sampah, kerja bakti lingkungan, serta koordinasi lintas sektor yang difasilitasi oleh kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan banjir di Kelurahan Utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi antaraktor dengan meninjau kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan kolaboratif, serta proses kolaborasi yang terjadi dalam pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah berbasis kolaborasi, khususnya di wilayah perkotaan.

Konsep *collaborative governance* berkembang sebagai respons atas keterbatasan pendekatan pemerintahan tradisional dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks dan lintas sektor. *Collaborative governance* dipahami sebagai suatu pengaturan di mana lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, serta bertujuan untuk mencapai kepentingan publik bersama (Ansell dan Gash, 2008).

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* terdiri atas beberapa dimensi utama yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah kondisi awal, yang mencakup riwayat hubungan antaraktor, kesenjangan sumber daya, serta tingkat kepercayaan yang telah terbentuk sebelumnya. Kondisi awal ini sangat menentukan keberhasilan kolaborasi, karena hubungan yang sebelumnya bersifat sektoral atau penuh konflik dapat mempengaruhi dinamika kerja sama di tahap selanjutnya.

Dimensi kedua adalah desain kelembagaan, yang berkaitan dengan kejelasan aturan main, mekanisme koordinasi, serta pembagian peran antaraktor yang terlibat. Desain kelembagaan yang baik akan menciptakan ruang kolaborasi yang inklusif dan mendorong partisipasi aktif seluruh pihak. Dalam konteks pengelolaan sampah, desain kelembagaan dapat

berupa regulasi lokal, standar operasional prosedur, forum koordinasi, serta peran formal masing-masing aktor.

Dimensi ketiga adalah kepemimpinan kolaboratif, yang berperan sebagai fasilitator dalam menjaga jalannya proses kolaborasi. Kepemimpinan tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai mediator konflik, penggerak komitmen, serta penjaga keberlanjutan kerja sama (Ansell dan Gash, 2008). Dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, peran pemimpin lokal seperti lurah, RT, dan RW menjadi sangat penting dalam mendorong partisipasi warga.

Dimensi keempat adalah proses kolaborasi, yang mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, serta pencapaian hasil awal atau *small wins*. Proses ini bersifat dinamis dan berkelanjutan, di mana interaksi yang intensif antaraktor dapat memperkuat kepercayaan dan memperbaiki kualitas kolaborasi dari waktu ke waktu. *Small wins*, seperti berkurangnya sampah di saluran air atau meningkatnya partisipasi warga, menjadi indikator penting keberhasilan awal kolaborasi.

Dalam konteks pengelolaan sampah dan pencegahan banjir, *collaborative governance* memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana kerja sama lintas aktor dapat meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan di tingkat lokal. Pendekatan ini relevan untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah perkotaan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan banjir di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, interaksi antaraktor, serta dinamika kolaborasi yang terjadi di lapangan (Creswell, 2014).

Subjek penelitian meliputi aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah, yaitu pihak kelurahan, RT/RW, Dinas Lingkungan

Hidup Kota Cimahi, pengelola bank sampah, komunitas lingkungan, pihak swasta, serta masyarakat setempat. Objek penelitian adalah proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah dan perannya dalam mencegah terjadinya banjir di tingkat kelurahan. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung informan terhadap fenomena yang diteliti.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang didukung oleh pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, serta dokumentasi berupa arsip, peraturan, dan laporan kegiatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan mencakup informasi terkait kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan, peran kepemimpinan, serta proses kolaborasi antaraktor.

Variabel penelitian dianalisis secara kualitatif berdasarkan dimensi *collaborative governance*, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan kolaboratif, dan proses kolaborasi (Ansell dan Gash, 2008). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan. Penelitian ini tidak menggunakan model statistik, karena fokus analisis terletak pada pemaknaan data kualitatif dan keterkaitan antar dimensi kolaborasi.

## **PEMBAHASAN**

Proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Utama muncul karena masalah lingkungan yang terus berulang, terutama sampah yang menumpuk di saluran air dan sering menyebabkan genangan bahkan banjir kecil saat hujan turun. Kondisi ini lama-kelamaan disadari tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Karena itu, kelurahan mulai mendorong keterlibatan berbagai pihak, seperti RT/RW, Dinas Lingkungan Hidup, komunitas lingkungan, pihak swasta di sekitar wilayah,

serta warga masyarakat. Melalui kerja bersama ini, setiap pihak berperan sesuai kapasitasnya untuk mengurangi sampah dan menjaga saluran air agar tetap berfungsi dengan baik.

Selanjutnya, dalam pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan berkaitan dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Banjir Di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi” melalui teknik analisis data kualitatif yang berlangsung selama penelitian berlangsung.

#### Kondisi Awal Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1. kondisi awal pengelolaan sampah di Kelurahan Utama sebelum kolaborasi berlangsung masih ditandai oleh hubungan kerja yang bersifat parsial dan reaktif. Masing-masing aktor, seperti kelurahan, RT/RW, dan Dinas Lingkungan Hidup, telah menjalankan perannya, namun belum terintegrasi dalam suatu mekanisme kerja bersama. Pengelolaan sampah lebih banyak dilakukan sebagai respons terhadap keluhan warga atau kejadian tertentu, seperti saluran air yang tersumbat atau banjir lokal. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa riwayat hubungan antaraktor dan kesenjangan sumber daya dapat menjadi penghambat awal dalam kolaborasi (Ansell dan Gash, 2008).

Dalam konteks ini, masyarakat dan komunitas lingkungan belum sepenuhnya dilibatkan sebagai aktor aktif, sehingga kesadaran dan partisipasi warga masih rendah. Kondisi tersebut memperkuat temuan bahwa permasalahan sampah tidak hanya bersumber dari aspek teknis, tetapi juga dari lemahnya keterlibatan sosial sejak awal. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung asumsi bahwa kondisi awal yang kurang

terkoordinasi menjadi pemicu perlunya pendekatan collaborative governance dalam pengelolaan sampah.

## 2. Desain Kelembagaan dan Kejelasan Peran Aktor

Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa desain kelembagaan mulai mengalami perbaikan setelah adanya kolaborasi. Keberadaan regulasi daerah, standar operasional prosedur, serta mekanisme koordinasi formal antara kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup memberikan arah yang lebih jelas dalam pengelolaan sampah. Selain itu, pembagian peran antaraktor menjadi lebih terdefinisi, di mana RT/RW berperan sebagai penggerak di tingkat lingkungan, kelurahan sebagai fasilitator, dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pendukung teknis.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi desain kelembagaan tersebut belum sepenuhnya seragam di lapangan. Beberapa mekanisme masih bergantung pada inisiatif lokal dan komunikasi informal. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun aturan dan struktur telah tersedia, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kapasitas aktor pelaksana. Temuan ini memperkuat argumen bahwa desain kelembagaan yang inklusif perlu diiringi dengan penguatan koordinasi dan konsistensi pelaksanaan (Ansell dan Gash, 2008).

## 3. Kepemimpinan Kolaboratif sebagai Penggerak Proses

Peran kepemimpinan kolaboratif terbukti menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kerja sama antaraktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lurah, ketua RT/RW, serta pengelola bank sampah berperan aktif sebagai fasilitator, mediator konflik, dan penggerak partisipasi masyarakat. Kepemimpinan tidak hanya ditunjukkan melalui pengambilan

keputusan, tetapi juga melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan lingkungan dan upaya membangun komunikasi yang persuasif dengan warga.

Dalam beberapa kasus konflik terkait pembuangan sampah, pendekatan musyawarah dan mediasi yang dilakukan oleh pemimpin lokal mampu mencegah konflik berkepanjangan dan menjaga kepercayaan antarwarga. Temuan ini sejalan dengan konsep kepemimpinan fasilitatif yang menekankan kemampuan pemimpin dalam membangun komitmen bersama dan menjaga stabilitas kolaborasi (Ansell dan Gash, 2008). Dengan demikian, hasil penelitian ini menguatkan dugaan bahwa kepemimpinan kolaboratif berperan signifikan dalam keberhasilan pengelolaan sampah berbasis kolaborasi.

#### 4. Proses Kolaborasi dan Pencapaian *Small Wins*

Proses kolaborasi di Kelurahan Utama ditandai oleh meningkatnya dialog tatap muka, komunikasi rutin, dan kerja bersama antaraktor. Pertemuan, kegiatan kerja bakti, serta sosialisasi pemilahan sampah menjadi ruang interaksi yang memperkuat kepercayaan dan komitmen antar pihak. Meskipun tidak selalu dilakukan secara formal, proses ini memungkinkan penyelesaian masalah secara lebih cepat dan responsif.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya pencapaian awal atau *small wins*, seperti saluran air yang lebih bersih, berkurangnya sampah yang menyumbat drainase, serta meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan lingkungan. Pencapaian kecil ini memiliki peran penting dalam menjaga motivasi aktor dan keberlanjutan kolaborasi. Temuan ini sesuai dengan

pandangan bahwa keberhasilan awal dapat memperkuat kepercayaan dan mendorong kolaborasi jangka panjang (Ansell dan Gash, 2008).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian mendukung asumsi awal bahwa *collaborative governance* mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan berkontribusi pada upaya pencegahan banjir di tingkat kelurahan. Namun demikian, keberlanjutan kolaborasi masih memerlukan penguatan regulasi, inovasi teknis, serta konsistensi komitmen dari seluruh aktor yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi telah berjalan dan memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan banjir di tingkat lokal. Kolaborasi yang melibatkan kelurahan, RT/RW, Dinas Lingkungan Hidup, komunitas lingkungan, pihak swasta, dan masyarakat mampu mengubah pola pengelolaan sampah yang sebelumnya bersifat parsial dan reaktif menjadi lebih terkoordinasi dan partisipatif. Kejelasan peran antaraktor, dukungan regulasi, serta kepemimpinan kolaboratif yang bersifat fasilitatif mendorong meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah dan kegiatan kebersihan lingkungan. Proses dialog yang berlangsung secara berkelanjutan turut membangun kepercayaan dan komitmen bersama, yang ditunjukkan melalui capaian awal seperti berkurangnya penumpukan sampah di saluran air dan meningkatnya kesadaran warga terhadap kebersihan lingkungan. Dengan demikian, *collaborative governance* terbukti menjadi pendekatan yang relevan dan efektif dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai strategi pencegahan banjir di tingkat kelurahan, meskipun masih memerlukan penguatan keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Booher, J. E. (2010). *Planning with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy*. London & New York: Routledge (Taylor & Francis Group).
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. london: B 1/I 1 Mohan Cooperative Industrial Area Mathura Road, New Delhi 110 044 India.
- Dr. Agustinus Subarsono, M. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Solo: Smart Media.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gribble, M. S. (2017). *Politics and policy Implementation in the Third World*. Amerika: Princeton University Press, Princeton, New Jersey In the United Kingdom.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Sinar Grafik Ofsfset.
- Kodoatie, R. J. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lisdanur Ulfaida, L. M. (2024). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR ANTRI KOTA CIMAHI. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*.
- Marfai, M. A. (2012). *Pengantar Banjir dan Mitigasinya di Wilayah Perkotaan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Mulyana, D. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Poth, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, California, USA: Sage Publications.
- Robert Agranoff, M. M. (2003). *Collaborative Public Management*. America: Georgetown University Press.
- Soewarno. (1995). *Hidrologi: Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa Data*. Bandung: Nova.
- Sudarmono Drs., M. P. (2015). *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Memuat Pengalaman Penelitian Lapangan Tentang Isu*

- Pedagang Kaki Lima dan Konflik Antar Kelompok*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press (UNS Press).
- Sugiyono. (2016). In k. d. *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suripin. (2004). *Sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Karsa.
- Chris ansell, A. G. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 545.
- Hanberger, A. (2004). Democratic Governance and Evaluation. *Sixth European Evaluation Society (EES) Conference* (p. 245). Berlin, Germany: European Evaluation Society (EES).
- Jeanne Steza Ryna Sianturi, K. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Salin Swara Di Kota Bontang. *Inovasi dan Kreatif*.
- John M. Bryson, B. C. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. *onlinelibrary.wiley*.
- Keith G.Provan, P. K. (2008 ). Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory* 18(2).
- KemenLHK. (2021, Juni 25). *PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA*. Retrieved from Peraturan Pengelolaan sampah dan Bank Sampah: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233754/permen-lhk-no-14-tahun-2021>
- Kirk Emerson, T. N. (2015). Evaluating the Productivity of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix. *Politics & international relations*.
- Kurhayadi. (2020). Collaborative Governance in Waste Management in Bandung City. *International Journal Of Science and Society*.
- Maurits Waardenburg, M. G. (2020). Paradoxes of Collaborative Governance: Investigating the Real-Life Dynamics of Multi-Agency Collaborations

- Using a Quasi-Experimental Action-Research Approach. *Public Management Review*, 386–407.
- Sri Afnitawati Rizky, A. P. (2021). Model Collaborative Governance Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Bogor. *Penelitian Pendidikan*.
- BNPB. (2020). *Indeks Risiko Bencana Indonesia*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Cimahi, A. D. (n.d.). *Profil Badan Publik*. Retrieved from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ppid.cimahikota.go.id/image/document/dinas-lingkungan-hidup-profil-badan-publik-dinas-lingkungan-hidup.pdf#:~:text=Dinas%20Lingkungan%20Hidup%20adalah%20unsur%20pelaksana%20Urusan,bertanggung%20j
- Cimahi, A. P. (2025). *Mandiri dalam Pengelolaan Sampah Kota Tahun 2025, Kota Cimahi Targetkan Tidak Buang Sampah Ke TPA*. Cimahi.
- Cimahi, D. K. (2024). *Disduk Kota Cimahi*. Retrieved from Data Demografis Jenis Kelamin: [https://disdukcapil.cimahikota.go.id/demografi-jenis\\_kelamin?utm\\_source](https://disdukcapil.cimahikota.go.id/demografi-jenis_kelamin?utm_source)
- Hardiana, R. (2024). *Awas Si Koma, Inovasi Unggulan Pemkot Cimahi Kelola Sampah Lewat Kegiatan Sirkular Ekonomi Mandiri*. cimahi: cimahikota.go.
- Hardiana, R. (2025). *TPA Sarimukti Tetap Dibatasi, DLH Kota Cimahi Ingatkan Warga Pilah Sampah*. Cimahi: Cimahikota.
- Kompas. (2025). *Darurat Sampah di Cimahi, Pemkot Buka Opsi Buang Sampah ke Kabupaten Bogor*. Cimahi: kompas.com.
- Pradana, W. (2023). *Warga Cimahi Hasilkan 226 Ton Sampah Sehari*. Cimahi: Detikjabar.
- Pradana, W. (2025). *Banjir Rendam Sekolah dan 11 Rumah di Cimahi Selatan*. Cimahi: Detikjabar.
- Rahadhyhan, A. (2023). *Optimalkan Pengelolaan Sampah, Pemkot Cimahi Targetkan Zero No Lanfill*. cimahi: cimahikota.go.id.

Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Timbulan Sampah

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Banjir dan Infrastruktur